

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 21 April 2021



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Liputan6.com	Rabu, 21 April 2021	Kementerian PUPR Buka Rekrutmen Program Magister Super Spesialis Angkatan II	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) kembali membuka rekrutmen program Magister Super Spesialis. Ini diadakan guna menjawab memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang ahli, kompeten, terampil, dan dinamis kala Indonesia tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur secara masif. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4537119/kementerian-pupr-buka-rekrutmen-program-magister-super-spesialis-angkatan-ii https://economy.okezone.com/read/2021/04/20/455/2397757/pak-bas-buka-lowongan-kerja-di-kementerian-pupr-cek-syaratnya
2	Kontan.co.id	Rabu, 21 April 2021	Pembangunan 1.005 hunian tetap tahap 1B senilai Rp 110,07 miliar di Sulteng capai 42%	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan tengah melanjutkan pembangunan hunian tetap (Huntap) tahap 1B sebanyak 1.005 unit di Provinsi Sulawesi Tengah. Program tersebut berlangsung di tiga Kabupaten/Kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. https://industri.kontan.co.id/news/pembangunan-1005-hunian-tetap-tahap-1b-senilai-rp-11007-miliar-di-sulteng-capai-42 https://www.antaranews.com/berita/2111294/kementerian-pupr-lanjutkan-konstruksi-1005-hunian-tetap-di-sulteng https://koran-jakarta.com/pupr-lanjutkan-pembangunan-hunian-tetap-sebanyak-1-005-unit-di-sulawesi-tengah
3	Viva.co.id	Rabu, 21 April 2021	Kementerian PUPR Bangun Rusun untuk ASN di Bogor	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan rusun ASN PUPR tersebut akan dibangun delapan lantai dengan kapasitas hunian 92 unit dengan nilai kontrak pembangunan Rp56,74 miliar. https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1366098-rumah-susun-asn-dibangun-di-bogor-agar-lebih-dekat-ke-kantor https://jakarta.bisnis.com/read/20210421/383/1383943/kementerian-pupr-bangun-rusun-untuk-asn-di-bogor

				https://www.antaranews.com/berita/2110598/kementerian-pupr-bangun-rumah-susun-asn-di-bogor-jabar https://nusadaily.com/metro/kementeria-n-pupr-bangun-rumah-susun-asn-di-bogor-jabar.html
4	Antaranews.com	Rabu, 21 April 2021	Pemerintah kucurkan bantuan untuk 157 ribu rumah bersubsidi di tahun 2021	Pemerintah kucurkan bantuan untuk 157 ribu rumah bersubsidi di tahun 2021. Pada tahun 2021, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 157.500 unit rumah KPR bersubsidi. https://www.antaranews.com/foto/2112046/pemerintah-kucurkan-bantuan-untuk-157-ribu-rumah-bersubsidi-di-tahun-2021
5	Bisnis.com	Rabu, 21 April 2021	Dukung KSPN Danau Toba, PUPR Akan Resmikan Dua SPAM	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan SPAM di sekitar KSPN Danau Toba dapat menjadi katalis positif. Pasalnya, pengoperasian SPAM di SPN Danau Toba dapat menjaga optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pariwisata saat pandemi Covid-19. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210420/45/1383677/dukung-kspn-danau-toba-pupr-akan-resmikan-dua-spam
6	Bisnis.com	Rabu, 21 April 2021	Perusahaan Konstruksi Asing Bertambah, Gapensi: Bisa Jadi Lokomotif Baru	Pandemi Covid-19 telah memukul sebagian badan usaha jasa konstruksi (BUJK) lokal dan dipaksa gulung tikar. Pada saat yang sama, jumlah BUJK asing di dalam negeri justru meningkat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendata tahun lalu ada 6 unit BUJK asing yang menutup cabangnya. Namun demikian, data di lapangan menunjukkan 30 unit BUJK asing anyar masuk ke dalam negeri. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210420/45/1383205/perusahaan-konstruksi-asing-bertambah-gapensi-bisa-jadi-lokomotif-baru
7	Kabarpapua.co	Rabu, 21 April 2021	Bank Papua Jalin Kerjasama dengan Kementerian PUPR	Bank Papua jalin Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua. https://kabarpapua.co/bank-papua-jalin-kerjasama-dengan-kementerian-pupr/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bank-papua-jalin-kerjasama-dengan-kementerian-pupr

8	Jawapos.com	Rabu, 21 April 2021	Kementerian PUPR Cek Lokasi Proyek Jembatan Kaca Seruni Point Bromo	Pembangunan jembatan kaca yang digagas Kementerian PUPR, dipastikan digarap tahun ini. Bahkan, tim dari Kementerian PUPR dan pelaksana telah menyurvei tanah untuk pembangunan fondasi jembatan. Yakni, di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/20/04/2021/kementerian-cek-lokasi-proyek-jembatan-kaca-seruni-point-bromo/
---	-------------	---------------------	---	--

Judul	"Opor" Infrastruktur	Tanggal	21 April 2021
Media	Kompas, Halaman 11		
Resume	Kata opor pun memantik perhatian ketika tiba-tiba Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkannya pada pembukaan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021, beberapa waktu lalu. Ternyata, opor yang kali ini dimaksud Basuki bukanlah nama menu masakan. Opor ala Kementerian PUPR tersebut adalah singkatan dari optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi		

PEKERJAAN UMUM

"Opor" Infrastruktur

Begitu mendengar kata opor, kemungkinan besar yang segera terbayang adalah menu populer berupa gulai berbumbu aneka rempah. Sajian berupa daging unggas dalam kuah santan putih kekuningan yang gurih tersebut amat menggoda dan menggoyang lidah.

Kata opor pun memantik perhatian ketika tiba-tiba Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkannya pada pembukaan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021, beberapa waktu lalu. Lantas apa hubungannya opor dengan kementerian yang membidangi infrastruktur dan perumahan rakyat ini?

Ternyata, opor yang kali ini dimaksud Basuki bukanlah nama menu masakan. Opor ala Kementerian PUPR tersebut adalah singkatan dari optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi.

Pilihan singkatan opor ini menggambarkan orientasi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan, memelihara, mengoperasikan, dan merehabilitasi infrastruktur yang sudah selesai dibangun. Melalui program opor tersebut, infrastruktur yang sudah dibangun dalam 5-6 tahun terakhir diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan proyek baru yang sekiranya tidak rampung pada tahun 2023 atau 2024 dibatalkan atau tidak perlu dibangun. Pesan yang disampaikan di sini adalah kabinet sekarang tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan kurang baik untuk kabinet mendatang.

Melalui program opor ini, pembangunan infrastruktur baru yang murni mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara akan dilakukan dengan sangat selektif. Proyek infrastruktur akan diperhitungkan untuk dibangun apabila merupakan perintah Presiden, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), atau pinjaman.

KPBU kini menjadi salah satu alternatif skema pembiayaan infrastruktur. Hal ini tidak lepas dari kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan anggaran infrastruktur. Apalagi, belakangan, kondisi pandemi Covid-19 kian menuntut penyusunan ulang prioritas program di tengah keterbatasan anggaran. Kita tentu sepakat, aspek menyangkut kesehatan dan keselamatan warga adalah hal utama yang patut jadi prioritas.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Keuangan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk jangka waktu 2020-2024 mencapai Rp 6.445 triliun. Pembiayaan dari pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2.385 triliun atau 37 persen dari total kebutuhan.

Sementara pembiayaan dari pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mencapai Rp 1.353 triliun atau 21 persen. Adapun pembiayaan terbesar, yakni dari sektor swasta, diharapkan Rp 2.707 triliun atau 42 persen dari total kebutuhan.

Khusus di Kementerian PUPR, total kebutuhan investasi infrastruktur pada tahun anggaran 2020-2024 mencapai Rp 2.058 triliun. Di sisi lain, anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PUPR 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi sekitar sepertiga dari total kebutuhan tersebut, yakni Rp 623 triliun. Artinya, ada kesenjangan pendanaan hingga Rp 1.435 triliun.

Apabila dianalogikan dengan pilihan menu masakan di dapur suatu rumah tangga, pilihan membangun infrastruktur tentu tidak lepas dari ketersediaan uang belanja. Bicara dalam konteks yang lebih luas, pilihan "menu" proyek infrastruktur di suatu negara pada akhirnya tergantung anggaran belanja infrastruktur yang tersedia.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah mau tak mau harus mampu memilah dan memilih. Saat ini kita pun dituntut memilah mana yang harus diprioritaskan dan mana yang masih bisa ditunda. Alhasil, kearifan dibutuhkan untuk bisa membedakan keduanya. Hal ini agar pilihan yang diambil tersebut memberi manfaat seoptimal mungkin di tengah keterbatasan anggaran.

Akan tetapi, keterbatasan anggaran juga jangan dijadikan alasan untuk tidak mampu mengolah "menu" yang tepat. Kemampuan menghasilkan karya di tengah keterbatasan

